

IMPLEMENTASI *CIBEST MODEL* UNTUK MENGUKUR TINGKAT AKURASI DAN EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PADA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN KAMANG MAGEK



Melya Husna¹ , Rahayu Ningsih² , Muhammad Zulkarnain³ , Wilda Tri Handayani⁴ 

*Korespondensi :

Email :
melyahusna1990@gmail.com

Afiliasi Penulis :

¹Universitas Islam Negeri Sjech
M. Djamil Djambek Bukittinggi,
Indonesia

² STAI-YDI Lubuk Sikaping
Pasaman, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Sjech
M. Djamil Djambek Bukittinggi,
Indonesia

⁴Universitas Islam Negeri Sjech
M. Djamil Djambek Bukittinggi,
Indonesia

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 17 Mei 2025
Revisi : 18 Juni 2025
Diterima : 27 Juni 2025
Diterbitkan : 30 Juni 2025

Kata Kunci :

CIBEST Model, Akurasi,
Efektivitas, PKH, Kemiskinan.

Keyword :

*CIBEST Model, Accuracy,
Effectiveness, PKH, Poverty.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat akurasi dan efektivitas penyaluran bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan hasil analisis *CIBEST Model*. Lebih dalamnya penelitian ini ingin mengidentifikasi kesesuaian antara data penerima bantuan PKH dengan hasil klasifikasi kemiskinan menurut metode CIBEST di Kecamatan Kamang Magek serta bagaimana perannya dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kecamatan Kamang Magek. Penelitian ini merupakan penelitian *lapangan (Field Research)* dengan metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan kuisioner dan diolah dengan *software SPSS 30*. Populasi yang digunakan adalah Keluarga penerima Bantuan PKH di Kecamatan Kamang Magek yang berjumlah 576 KK. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin, sehingga diperoleh 236 KK sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akurasi penyaluran PKH adalah 73% sehingga mengindikasikan adanya potensi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan PKH sesuai dengan pengukuran *CIBEST Model*. Penelitian ini juga menemukan bahwa secara umum penyaluran bantuan pada Program Keluarga Harapan (PKH) efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kecamatan Kamang Magek. Indeks kemiskinan *CIBEST Model* menunjukkan adanya perubahan tingkat kemiskinan sebelum dan setelah mendapatkan bantuan. Kuadran I meningkat sebesar 10,2%. Kuadran II turun sebesar 5,9%. Kuadran III mengalami kenaikan sebesar 3,3%, kuadran IV mengalami penurunan sebesar 7,6%. Namun, peningkatan pada kuadran III menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan masih perlu mendapat perhatian lebih dalam desain program bantuan ke depannya sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan di Kecamatan Kamang Magek dengan maksimal.

This study aims to measure the accuracy and effectiveness of the distribution of social assistance under the Family Hope Program (PKH) based on the analysis of the CIBEST Model. Specifically, it seeks to identify the alignment between the data of PKH beneficiaries and the classification of poverty according to the CIBEST method in Kamang Magek District, as well as the program's role in reducing poverty in the area. This research is a field study using a descriptive quantitative method.



Quantitative data were collected through questionnaires and analyzed using SPSS version 30. The population consisted of 576 households receiving PKH assistance in Kamang Magek District. The sample size was determined using the Slovin formula, resulting in a sample of 236 households. The findings show that the accuracy of PKH distribution is 73%, indicating a potential mismatch in beneficiary targeting based on the CIBEST Model assessment. The study also found that, in general, the distribution of assistance through the Family Hope Program (PKH) has been effective in reducing poverty levels in Kamang Magek District. The CIBEST Model's poverty index revealed a shift in poverty levels before and after receiving assistance. Quadrant I increased by 10.2%, Quadrant II decreased by 5.9%, Quadrant III rose by 3.3%, and Quadrant IV decreased by 7.6%. However, the increase in Quadrant III suggests that religious and spiritual development still requires greater attention in future program designs to optimally reduce poverty in Kamang Magek District.

Pendahuluan

Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah struktural yang kompleks dan multidimensional, tidak hanya mencakup aspek ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan keterbatasan dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial (Khaliq & Uspri, 2017). Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan materialistik yang melihat pendapatan sebagai satu-satunya indikator kesejahteraan (Fuady et al., 2022). Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan berbagai program bantuan sosial sebagai bentuk intervensi dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) (Suleman & Resnawaty, 2017). Program ini dirancang sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga prasejahtera, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan (Nasution et al., 2023).

PKH merupakan program andalan pemerintah dalam mendorong inklusi sosial dan memperkuat ketahanan keluarga miskin (Viera Valencia & Garcia Giraldo, 2019). Namun demikian, pelaksanaan program ini tidak lepas dari berbagai persoalan teknis dan administratif, termasuk dalam hal validitas dan akurasi data penerima bantuan (Garini et al., 2023). Salah satu tantangan mendasar dalam pelaksanaan PKH adalah ketidaktepatan penyaluran bantuan, yang ditandai dengan masih ditemukannya keluarga yang seharusnya berhak menerima bantuan namun tidak terdaftar, serta sebaliknya, keluarga yang sudah relatif sejahtera justru masih tercatat sebagai penerima (Hasanah, 2016). Fenomena ini mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penentuan

penerima manfaat agar program bantuan sosial dapat benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan.

Kecamatan Kamang Magek sebagai bagian dari wilayah administratif Kabupaten Agam di Sumatera Barat juga menjadi salah satu wilayah yang menerima alokasi bantuan PKH. Meski secara umum pelaksanaan program ini berjalan sesuai mekanisme, sejumlah laporan dari masyarakat menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian dalam daftar penerima bantuan. Situasi ini mengundang perhatian untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai efektivitas dan akurasi distribusi bantuan sosial di wilayah tersebut. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dalam sistem penyaluran, tetapi juga untuk mengusulkan pendekatan baru yang lebih tepat dalam mengukur kemiskinan dan kelayakan penerima bantuan.

Dalam konteks ini, model CIBEST (*Center for Islamic Business and Economic Studies*) hadir sebagai salah satu pendekatan alternatif yang menarik untuk dikaji. *CIBEST model* dirancang untuk mengukur kemiskinan secara lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan dua dimensi utama, yaitu kemiskinan material dan kemiskinan spiritual (Rabbani & Bundo, 2024). Berbeda dengan pendekatan konvensional yang hanya menekankan pada kekurangan ekonomi, model CIBEST memasukkan nilai-nilai spiritual sebagai salah satu komponen penting dalam menentukan kesejahteraan seseorang. Pendekatan ini dinilai lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang secara sosiokultural menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan (Beik & Arsyianti, 2015).

Penerapan model CIBEST dalam konteks penyaluran bantuan sosial seperti PKH berpotensi memberikan perspektif baru dalam mengevaluasi akurasi data penerima. Melalui pendekatan ini, rumah tangga dapat dikategorikan ke dalam empat kuadran, yaitu sejahtera (tidak miskin secara material dan spiritual), miskin material, miskin spiritual, dan miskin absolut (miskin secara material dan spiritual). Klasifikasi ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk memahami kondisi masyarakat secara lebih holistik dan menyusun strategi intervensi yang lebih tepat sasaran. Selain itu, pengukuran berbasis model CIBEST juga dapat menjadi dasar dalam merancang sistem seleksi penerima bantuan yang lebih objektif, transparan, dan akuntabel.

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan model CIBEST dalam mengukur tingkat akurasi dan efektivitas penyaluran bantuan sosial pada Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kamang Magek. Selain itu penelitian ini juga dimaksudkan untuk menilai sejauh mana model ini dapat digunakan sebagai alat evaluasi yang relevan dan aplikatif dalam konteks kebijakan bantuan sosial di tingkat daerah. Dengan pendekatan ini diharapkan akan ditemukan gambaran yang lebih jelas mengenai kualitas penyaluran bantuan serta potensi perbaikan yang dapat dilakukan ke depannya.

Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sosial, sudah seharusnya instrumen evaluasi program seperti PKH tidak hanya didasarkan pada laporan administratif semata tetapi juga harus dilengkapi dengan analisis ilmiah yang berbasis data dan metodologi yang komprehensif (Shah et al., 2025). Oleh karena itu, implementasi model CIBEST dalam konteks ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam perbaikan sistem penyaluran bantuan baik dari segi ketepatan sasaran maupun efektivitas dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga penerima.

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis. Dari sisi akademik, penelitian ini memperkaya khazanah studi evaluasi program sosial dengan pendekatan berbasis ekonomi Islam. Sementara dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang berguna bagi pemerintah Kabupaten Agam dan Kementerian sosial khususnya pendamping PKH di Kecamatan Kamang dalam memperbaiki mekanisme seleksi dan distribusi bantuan agar lebih tepat sasaran. Penelitian ini juga berpotensi menginspirasi studi serupa di wilayah lain, khususnya dalam konteks penerapan model pengukuran kemiskinan yang lebih kontekstual dan berbasis nilai.

Dengan demikian, pemilihan judul "Implementasi CIBEST Model untuk Mengukur Tingkat Akurasi dan Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kamang Magek" didasari oleh urgensi dan relevansi topik tersebut dalam konteks pembangunan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Upaya mengevaluasi dan meningkatkan kualitas program bantuan sosial harus terus dilakukan secara berkelanjutan agar tujuan utama dari program tersebut yaitu pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat benar-benar tercapai. Saat ini pengukuran dampak bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan umumnya masih terfokus pada aspek material semata. Padahal dalam konteks Islam, kemiskinan juga mencakup dimensi spiritual. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang mampu mencakup kedua aspek tersebut secara holistik, seperti metode CIBEST (*Center of Islamic Business and Economic Studies*) yang menawarkan pengukuran kemiskinan dari sudut pandang Islam dengan mengintegrasikan kebutuhan material dan spiritual secara seimbang.

Kerangka Pemikiran

Kemiskinan dewasa ini dipahami sebagai suatu kondisi yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan secara sederhana dalam satu definisi tunggal sehingga bersifat multidimensional (Beik & Arsyianti, 2015). Para ahli dari berbagai bidang keilmuan telah berupaya merumuskan arti dari kemiskinan, namun hingga kini belum tercapai kesepakatan mengenai satu pengertian yang bersifat universal.

Perbedaan pandangan muncul karena pendekatan yang digunakan pun beragam, mencakup pendekatan ekonomi, sosial, bahkan moral. Meskipun konsep kemiskinan masih menjadi perdebatan, nyatanya persoalan ini tetap menjadi perhatian utama dalam agenda pembangunan. Salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi adalah bagaimana mengurangi tingkat kemiskinan dan memperkecil jurang ketimpangan antara masyarakat yang berkecukupan dan yang kurang mampu (Armida Salsiah Alisjahbana, 2018).

Dalam pandangan Shirazi (Shirazi, 1994), kemiskinan diartikan sebagai suatu kondisi di mana individu tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Kondisi ini tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, psikologis, dan spiritual. Artinya, kemiskinan mencerminkan ketidakmampuan seseorang dalam mencukupi kebutuhan dasarnya untuk hidup dengan bermartabat.

Untuk memperjelas pemahaman mengenai kemiskinan, diperlukan adanya batasan yang jelas dan baku terkait kebutuhan hidup minimal yang harus dipenuhi oleh individu atau rumah tangga agar tidak tergolong miskin. Namun, merumuskan standar kebutuhan hidup ini bukanlah hal yang mudah, sebab apa yang dianggap sebagai kebutuhan dasar sering kali dipengaruhi oleh pandangan yang sangat subjektif. Subjektivitas tersebut dapat timbul dari sudut pandang pribadi, pandangan masyarakat, maupun kebijakan negara. Akibatnya, ukuran dan definisi kebutuhan hidup layak ini dapat berbeda-beda antar daerah, tergantung pada konteks sosial, budaya, dan ekonomi masing-masing wilayah.

Pendekatan terhadap kemiskinan sebagaimana dijelaskan oleh Todaro dan Smith (Todaro & Smith, 2015) pada dasarnya merepresentasikan konsep kemiskinan absolut, yakni kondisi ketika seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya. Dalam pendekatan ini, kebutuhan dasar dihitung berdasarkan nilai moneter tertentu yang dijadikan sebagai ambang batas. Artinya, seseorang dikategorikan sebagai miskin apabila pendapatan atau pengeluaran yang dimilikinya tidak mencapai nilai minimum yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar. Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan, yakni nilai minimum pengeluaran yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari maupun kebutuhan non-makanan. Individu yang pengeluaran per kapitanya dalam sebulan berada di bawah batas ini dikategorikan sebagai miskin (Provinsi et al., 2010). Garis Kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp595.242,00/kapita/ bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp443.433,00 dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp151.809,00 (Statistik, 2025). Hal ini berarti masyarakat yang memiliki tingkat pengeluaran di bawah Rp 595.242,00/kapita/bulan termasuk kategori masyarakat miskin.

Dalam perspektif Islam, kebutuhan pokok tidak hanya mencakup aspek materi seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Hal ini ditegaskan dalam QS. Thaha ayat 118–119 dan QS. Al-Quraisy ayat 3–4, yang menunjukkan bahwa kebutuhan dasar mencakup kemampuan untuk beribadah, terpenuhinya kebutuhan fisik, serta terjaminnya rasa aman (Beik & Arsyianti, 2015). Dengan demikian, kebutuhan pokok menurut Islam bersifat multidimensi, meliputi aspek duniawi dan ukhrawi. Oleh karena itu, dalam merumuskan standar kebutuhan dasar dan mendefinisikan kemiskinan, penting untuk mempertimbangkan unsur spiritual dan ibadah secara terukur. Ini memungkinkan munculnya dua jenis kemiskinan: kemiskinan materiil, yaitu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan fisik yang dapat diukur melalui survei dan analisis sosial; dan kemiskinan spiritual, yakni ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan rohaninya, termasuk menjalankan ibadah wajib maupun sunnah. Kedua bentuk kemiskinan ini memiliki karakteristik dan penyebab yang berbeda, sehingga pendekatan penanggulangannya pun perlu disesuaikan.

Di Indonesia, pemerintah membuat suatu kebijakan untuk mengatasi problematika kemiskinan, kurangnya pendidikan, lemahnya perekonomian dalam masyarakat dengan membentuk Program Keluarga Harapan (PKH) (Nurchotimah et al., 2020). PKH merupakan suatu program pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin. Program perlindungan sosial ini bertujuan untuk mengurangi beban Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan diharapkan dapat mengakhiri mata rantai kemiskinan antar-generasi dengan memberikan bantuan uang tunai kepada RTSM yang dapat memenuhi kewajiban pendidikan dan kesehatan (RI, 2021).

Sasaran penerima PKH dapat dibedakan berdasarkan komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Setiap komponen memiliki kriteria sebagai berikut (RI, 2021):

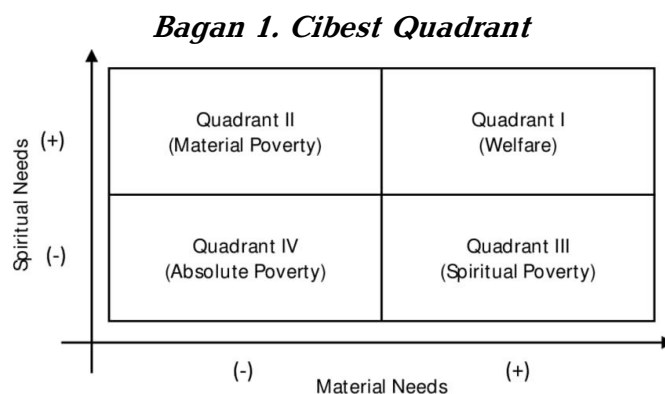
1. Komponen kesehatan : bantuan diperuntukkan kepada ibu hamil/nifas/menyusui serta anak balita.
2. Komponen Pendidikan : bantuan diperuntukkan kepada anak sekolah dengan rentang usia 6 – 21 Tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar.
3. Komponen kesejahteraan sosial : bantuan diperuntukkan kepada lansia dan penyandang disabilitas.

Pendampingan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dilakukan oleh pendamping PKH yang berada di setiap Kecamatan. Pendampingan tersebut diperlukan untuk mempercepat tercapainya salah satu tujuan PKH, yaitu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM terkait pemanfaatan

layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Demi tercapainya tujuan tersebut pendamping sosial PKH mempunyai peran dan fungsi fasilitasi, mediasi, advokasi, edukasi dan motivasi bagi KPM PKH (Kahfi, 2025).

Setelah menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH diharapkan terjadi perubahan perilaku terhadap KPM PKH dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial serta peningkatan status sosial ekonomi. Transformasi kepesertaan merupakan proses pengakhiran sebagai KPM PKH melalui kegiatan resertifikasi. Pada kegiatan resertifikasi, KPM PKH kembali dilakukan pendataan ulang dan evaluasi status sosial ekonominya setelah KPM PKH memperoleh bantuan PKH selama kurun waktu tertentu. Pada tahun ke lima menjelang berakhirnya kepesertaan PKH enam tahun, KPM akan dilakukan resertifikasi. Hasil dari resertifikasi akan digunakan untuk menetapkan status akhir kepesertaan PKH yaitu graduasi atau transisi (RI, 2021).

Pengukuran kemiskinan secara konvensional umumnya hanya menitikberatkan pada dimensi material, seperti pendapatan, konsumsi, atau akses terhadap kebutuhan dasar (Husna et al., 2019). Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya mencerminkan realitas kesejahteraan manusia secara utuh, terutama dalam perspektif Islam. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dikembangkanlah CIBEST Model (Center for Islamic Business and Economic Studies), yaitu suatu metode pengukuran kemiskinan yang mempertimbangkan dua aspek utama yaitu kesejahteraan material dan kesejahteraan spiritual. Gambaran model dapat dilihat pada bagan 1:



Sumber: (Beik & Arsyianti, 2016)

Model ini membagi kondisi masyarakat ke dalam empat kategori: sejahtera, miskin material, miskin spiritual, dan miskin absolut. Dengan menggabungkan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif berbasis nilai-nilai Islam, model ini dinilai lebih representatif dalam mengukur tingkat kemiskinan masyarakat muslim. Oleh karena itu, penggunaan *CIBEST Model* memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam mengevaluasi efektivitas program sosial berbasis nilai,

seperti Program Keluarga Harapan, khususnya dalam konteks pembangunan kesejahteraan yang menyeluruh.

Unit analisis *CIBEST Model* adalah keluarga. Skor untuk aspek material dilakukan dengan memodifikasi pendekatan BPS terkait dengan garis kemiskinan (GK) per kapita perbulan menjadi garis kemiskinan per rumah tangga per bulan. Sedangkan Skor aspek spiritual diperoleh dengan menggunakan persepsi kepala keluarga.

Akurasi dalam penyaluran bantuan sosial, khususnya pada Program Keluarga Harapan (PKH), merupakan aspek krusial dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Akurasi ini mengacu pada ketepatan data penerima manfaat, yang menjadi dasar utama dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan. Ketika data yang digunakan pemerintah tidak akurat, baik karena tidak mutakhir, tidak valid, atau tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat, maka bantuan berpotensi salah sasaran. Kesalahan semacam ini dapat menyebabkan kelompok yang benar-benar membutuhkan justru tidak memperoleh bantuan, sementara pihak yang sebenarnya tidak layak justru mendapatkan manfaat. Oleh karena itu, keakuratan data menjadi fondasi penting dalam memastikan program PKH dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, serta benar-benar berkontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan secara nyata.

Dalam beberapa kajian dijelaskan bahwa ketepatan dalam menetapkan sasaran program menjadi hal penting, sebab jika bantuan tidak diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan, maka dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi minim (Noerkaisar, 2021). Sementara itu, Bappenas menekankan bahwa data yang digunakan dalam pelaksanaan program perlindungan sosial perlu diverifikasi dan divalidasi secara berkala, agar tetap relevan dengan perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, di mana keakuratan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban terhadap data menjadi aspek penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan program bantuan sosial (BAPPENAS, 2023).

Tingkat akurasi penyaluran program PKH dilakukan dengan memberikan skor pada masing-masing variabel CIBEST Model dengan ketentuan berikut :

Tabel 1. Hasil Deskriptif Responden berdasarkan asal Nagari

Skor Aktual	≤ Nilai MV	> Nilai MV
> Nilai SV	Kaya Spiritual, Miskin Materiil (Kuadran II)	Kaya Spiritual, Kaya Materiil (Kuadran II)

≤ Nilai SV	Miskin Spiritual, Miskin Materiil (Kuadran II)	Miskin Spiritual, Kaya Materiil (Kuadran II)
---------------	--	--

Sumber: (Beik & Arsyianti, 2016)

Efektivitas pada dasarnya mencerminkan seberapa baik suatu program, kebijakan, atau kegiatan dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Irvanasari et al., 2018). Dalam ranah administrasi publik maupun pelaksanaan program sosial, efektivitas menunjukkan keberhasilan suatu inisiatif dalam menciptakan perubahan positif bagi kelompok sasaran (Viera Valencia & Garcia Giraldo, 2019). Mahmudi menjelaskan bahwa efektivitas berkaitan erat dengan sejauh mana hasil akhir dari suatu program sesuai dengan target yang ingin dicapai (Mahmudi, 2005). Jika hasil program dapat memenuhi atau bahkan melebihi sasaran, maka program tersebut dinilai efektif. Sementara itu menurut Siagian (Siagian, 2005), efektivitas lebih menekankan pada tercapainya hasil akhir tanpa mempertimbangkan seberapa besar sumber daya yang digunakan dalam prosesnya. Dalam konteks penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, efektivitas dapat diukur dari kemampuannya dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat secara nyata dan berkesinambungan dengan mengukur indeks kesejahteraan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan PKH. Pengukuran Indeks Kesejahteraan dilakukan dengan rumus (Beik & Arsyianti, 2016) :

$$W = \frac{w}{N}$$

Dimana :

W = Indeks Kesejahteraan; $0 \leq W \leq 1$

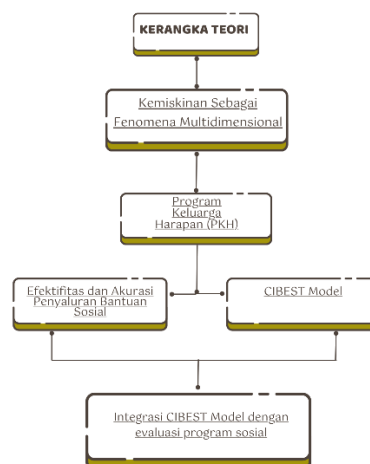
w = Jumlah Keluarga Sejahtera (Kaya materiil, kaya Spiritual)

N = Jumlah Populasi (Jumlah Keluarga yang di

Dari uraian diatas, dalam upaya menanggulangi kemiskinan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu intervensi strategis pemerintah yang berbasis bantuan sosial bersyarat (Shah et al., 2025). Namun, efektivitas dan akurasi program tersebut dalam menjangkau kelompok miskin secara tepat sasaran masih menjadi pertanyaan krusial (Garini et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *CIBEST Model (Center for Islamic Business and Economic Studies)* yang menggabungkan dua dimensi utama, yakni dimensi material dan dimensi spiritual sebagai alat ukur yang lebih komprehensif terhadap tingkat kemiskinan (Beik & Arsyianti, 2016). *CIBEST Quadrant* memungkinkan klasifikasi rumah tangga miskin ke dalam empat kategori: miskin absolut, miskin

material, miskin spiritual, dan sejahtera, sehingga dapat mengidentifikasi secara akurat karakteristik dan kebutuhan rumah tangga penerima manfaat. Dengan mengimplementasikan model ini di Kecamatan Kamang Magek, penelitian bertujuan untuk mengukur tingkat akurasi dan efektivitas distribusi bantuan PKH serta memberikan rekomendasi berbasis data terhadap perbaikan sistem penyaluran bantuan sosial di masa mendatang. Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran faktual tentang dampak PKH, tetapi juga mendorong pendekatan pengukuran kemiskinan yang lebih islami dan multidimensional. Bagan 2 berikut memperlihatkan kerangka pemikiran penelitian ini :

Bagan 2. Kerangka Pemikiran



Sumber: (Noerkaisar, 2021),(Viera Valencia & Garcia Giraldo, 2019), (Beik & Arsyianti, 2016)

Metodologi

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis ketepatan sasaran dan keberhasilan distribusi bantuan PKH menggunakan pendekatan *CIBEST Model* yang mencakup dimensi material dan spiritual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengukuran kemiskinan berbasis Islam, serta menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah dan lembaga sosial dalam meningkatkan kualitas kebijakan distribusi bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan berdampak nyata pada pengurangan kemiskinan. Penelitian ini merupakan penelitian *field research* dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada rumah tangga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kamang Magek. Kuesioner ini dirancang berdasarkan indikator-indikator dalam Model CIBEST, yang mencakup dimensi material (pendapatan, pengeluaran, kebutuhan pokok) dan dimensi spiritual (ibadah, moral, dan nilai-nilai keislaman). Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari laporan instansi terkait seperti Dinas Sosial dan pendamping PKH guna mendukung validitas hasil. Teknik ini memungkinkan

peneliti untuk mengukur tingkat kesejahteraan secara objektif dan menganalisis hubungan antara penyaluran bantuan dengan perubahan kondisi kemiskinan

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuan sosial berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Kecamatan Kamang Magek sebanyak 576 KK dengan teknik sampel menggunakan rumus slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Nilai *Margin Of Error* (0,05)

Sehingga sampel yang akan diambil dari populasi yakni sebanyak 236 KK dengan perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{576}{1 + 576 \cdot (0.05)^2} = \frac{576}{1 + 576 \cdot 0.0025}$$

$$n = \frac{576}{1 + 1.44} = \frac{576}{2.44} \approx 236.07$$

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji model pada data kuantitatif adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis variabel dengan menggunakan data kuantitatif. Alat yang digunakan Untuk melihat kausalitas secara kuantitatif adalah *software spss 30*.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Kepala Rumah Tangga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH

Analisis deskriptif responden diolah dengan SPSS 30 dengan hasil pengujian terkait dengan asal nagari KPM PKH yang ada Di Kecamatan Kamang Magek yang dapat dilihat pada Tabel 2 :

Tabel 2. Hasil Deskriptif Responden berdasarkan asal Nagari

NAGARI

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KAMANG MUDIAK	56	23,7	23,7	23,7
	PAUAH KAMANG MUDIAK	50	21,2	21,2	44,9
	KAMANG TANGAH	48	20,3	20,3	65,3
	KAMANG HILIA	21	8,9	8,9	74,2
	MAGEK	61	25,8	25,8	100,0
	Total	236	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Olahan Data Primer 2025

Berdasarkan distribusi responden pada tabel 2 diketahui bahwa jumlah terbanyak berasal dari Nagari Magek sebanyak 61 orang (25,8%), Kamang Mudiak sebanyak 56 orang (23,7%), dan Pauah Kamang Mudiak sebanyak 50 orang (21,2%). Sementara itu, Kamang Tengah menyumbang 48 responden (20,3%) dan jumlah terendah berasal dari Kamang Hilia sebanyak 21 orang (8,9%). Data ini menunjukkan bahwa penyebaran responden relatif merata, namun Nagari Magek merupakan wilayah dengan partisipasi tertinggi dalam penelitian ini. Hasil pengujian terkait dengan usia KPM PKH yang ada Di Kecamatan Kamang Magek yang dapat dilihat pada Tabel 3 :

Tabel 3. Hasil Deskriptif Responden berdasarkan Usia

USIA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-30 TAHUN	5	2,1	2,1	2,1
	31-40 TAHUN	46	19,5	19,5	21,6
	41-50 TAHUN	110	46,6	46,6	68,2
	51-60 TAHUN	50	21,2	21,2	89,4
	61-70 TAHUN	16	6,8	6,8	96,2
	71-80 TAHUN	9	3,8	3,8	100,0
	Total	236	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Olahan Data Primer 2025

Berdasarkan distribusi usia responden pada tabel 3, mayoritas berada pada rentang usia 41–50 tahun dengan jumlah 110 orang atau 46,6% dari total responden. Kelompok usia berikutnya yang dominan adalah 51–60 tahun sebanyak 50 orang (21,2%) dan 31–40 tahun sebanyak 46 orang (19,5%). Sementara itu, usia lanjut 61–70 tahun mencakup 6,8%, usia 71–80 tahun sebanyak 3,8%, dan yang termuda, usia 20–30 tahun, hanya mencakup 2,1%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada usia produktif akhir hingga pra-lansia yang umumnya menjadi kepala keluarga dan target utama program bantuan sosial. Hasil

pengujian terkait dengan jumlah anggota keluarga KPM PKH yang ada Di Kecamatan Kamang Magek yang dapat dilihat pada Tabel 4 :

Tabel 4. Hasil Deskriptif Responden berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga

JUMLAHANGGOTAKELUARGA					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-2 ORANG	11	4,7	4,7	4,7
	3-4 ORANG	68	28,8	28,8	33,5
	5-6 ORANG	118	50,0	50,0	83,5
	7-8 ORANG	36	15,3	15,3	98,7
	9-10 ORANG	3	1,3	1,3	100,0
	Total	236	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Olahan Data Primer 2025

Berdasarkan data jumlah anggota keluarga, mayoritas responden memiliki keluarga berjumlah 5–6 orang, yaitu sebanyak 118 orang atau 50% dari total responden. Sebanyak 68 responden (28,8%) memiliki anggota keluarga 3–4 orang, sementara yang memiliki 7–8 orang anggota keluarga mencapai 15,3%. Responden dengan jumlah anggota keluarga sangat kecil (1–2 orang) hanya 4,7%, dan yang terbesar (9–10 orang) hanya 1,3%. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga penerima bantuan tergolong keluarga besar, yang berpotensi memiliki beban ekonomi lebih tinggi dan relevan sebagai target program bantuan sosial.

Analisis *CIBEST Model* Dalam Menentukan Tingkat Akurasi Keluarga Penerima Manganat PKH

Cut off untuk tingkat kemiskinan material dan spiritual dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. *Cut Off* tingkat kemiskinan

Descriptive Statistics			
	N	Mean	Std. Deviation
MATERIAL.1	236	2,05	,859
MATERIAL.2	236	1,67	,842
TOTAL_MATERIAL	236	3,72	1,311
SPIRITUAL.1	236	4,05	,365
SPIRITUAL.2	236	4,18	,524
SPIRITUAL.3	236	4,03	,214
SPIRITUAL.4	236	4,59	,549
SPIRITUAL.5	236	4,64	,522
TOTAL_SPIRITUAL	236	21,48	1,373
Valid N (listwise)	236		

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder 2025

Berdasarkan output statistik Tabel 5, variabel material (TOTAL_MATERIAL) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,72 dengan standar deviasi 1,311, sedangkan variabel spiritual (TOTAL_SPIRITUAL) menunjukkan rata-rata 21,48 dan standar deviasi 1,373. Nilai rata-rata ini dapat dijadikan sebagai *cut-off point* atau garis batas dalam model CIBEST untuk menentukan kategori kesejahteraan. Dengan demikian, responden dengan skor material di bawah 3,72 dikategorikan mengalami kemiskinan material, sementara yang memiliki skor spiritual di bawah 21,48 diklasifikasikan sebagai miskin spiritual. Keduanya menjadi dasar untuk mengelompokkan responden ke dalam empat kuadran kesejahteraan menurut model CIBEST dimana jika skor spiritual >21,48 dan skor material >3,73 maka tergolong kuadran I (kaya spiritual, kaya materiil). Jika skor spiritual >21,48 dan skor material $\leq$ 3,73 maka tergolong kuadran II (kaya spiritual, miskin materiil). Jika skor spiritual $\leq$ 21,48 dan skor materiil >3,73 maka tergolong kuadran III (miskin spiritual, kaya materiil). Jika skor spiritual $\leq$ 21,48 dan skor materiil $\leq$ 3,73 maka tergolong kuadran IV (miskin spiritual, miskin materiil). Untuk melihat frekuensi masing-masing kuadran dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

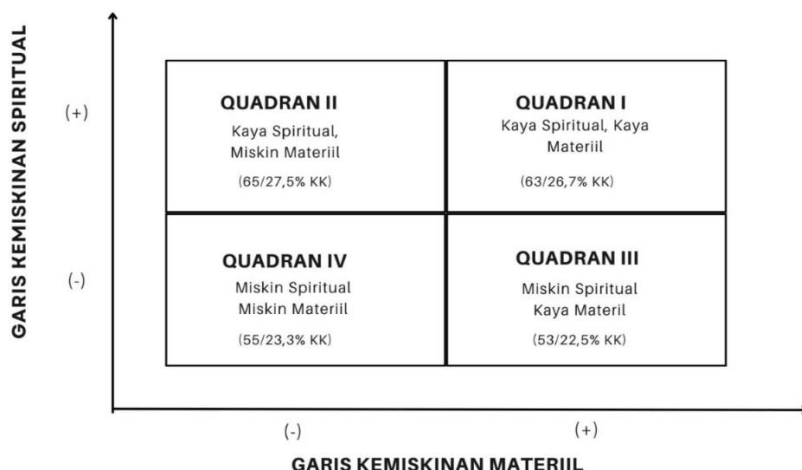
Tabel 6 . Frekuensi Kuadran

CIBEST_MODEL					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	63	26,7	26,7	26,7
	2	65	27,5	27,5	54,2
	3	53	22,5	22,5	76,7
	4	55	23,3	23,3	100,0
	Total	236	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder 2025

Berdasarkan hasil analisis frekuensi menggunakan Model CIBEST terhadap 236 keluarga penerima manfaat PKH, diketahui bahwa sebanyak 27,5% responden berada pada kuadran 2 (miskin material), yang merupakan proporsi tertinggi. Disusul oleh 26,7% responden pada kuadran 1 (sejahtera), 23,3% pada kuadran 4 (miskin absolut), dan 22,5% pada kuadran 3 (miskin spiritual). Gambar 2 merupakan realisasi olahan data yang dimasukkan dalam diagram CIBEST Model :

Gambar 2. Cibest Quadrant Sebelum menjadi KPM PKH



Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder 2025

Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas penerima bantuan memang tergolong miskin secara material atau absolut, namun terdapat sekitar seperempat responden yang tergolong sejahtera, sehingga mengindikasikan adanya potensi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan PKH sesuai dengan pengukuran *CIBEST Model*.

Analisis *CIBEST Model* Dalam Menentukan Tingkat efektivitas Program Terhadap Penanggulangan Kemiskinan

Model CIBEST digunakan untuk mengukur efektivitas program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dalam menanggulangi kemiskinan secara multidimensi, yaitu mencakup aspek material dan spiritual. Efektivitas program dilihat dari perpindahan posisi rumah tangga dalam kuadran CIBEST sebelum dan sesudah menerima bantuan. Tabel 7 ntuk melihat frekuensi masing-masing kuadran sesudah menerima bantuan PKH :

**Tabel 7. Frekuensi Kuadran
CIBEST_MODEL_SESUDAH**

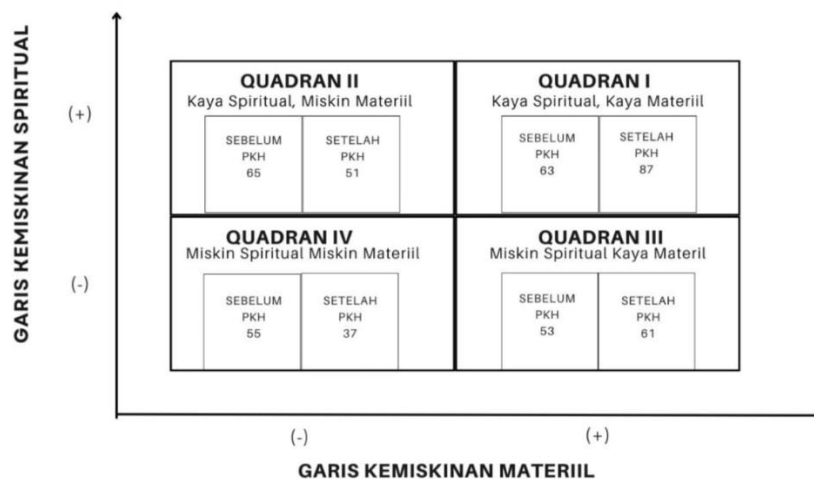
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	87	36,9	36,9	36,9
	2	51	21,6	21,6	58,5
	3	61	25,8	25,8	84,3
	4	37	15,7	15,7	100,0
	Total	236	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder 2024

Berdasarkan hasil analisis frekuensi masing-masing kuadran pada tabel 7 setelah pemberian bantuan PKH, sebanyak 87 keluarga (36,9%) berada pada

kuadran I atau kategori sejahtera, menunjukkan kondisi material dan spiritual yang baik. Sebanyak 51 keluarga (21,6%) masih berada pada kuadran II (miskin material), sedangkan 61 keluarga (25,8%) masuk ke dalam kuadran III (miskin spiritual). Adapun 37 keluarga (15,7%) tetap berada di kuadran IV atau kondisi miskin absolut, yang berarti masih mengalami kekurangan baik secara material maupun spiritual. Hasil ini mengindikasikan adanya pergeseran positif menuju kesejahteraan, meskipun sebagian keluarga masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Gambar 3 merupakan realisasi olahan data yang dimasukkan dalam diagram CIBEST Model setelah diberikan bantuan PKH:

Gambar 3. Cibest Quadrant Sebelum menjadi KPM PKH



Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder 2025

Berdasarkan data distribusi frekuensi kuadran CIBEST sebelum dan sesudah menerima bantuan PKH pada gambar 3, terlihat adanya pergeseran posisi rumah tangga dalam dimensi kemiskinan. Sebelum menerima bantuan, sebanyak 63 rumah tangga berada di kuadran I (sejahtera), 65 rumah tangga di kuadran II (miskin material), 53 rumah tangga di kuadran III (miskin spiritual), dan 55 rumah tangga di kuadran IV (miskin spiritual, miskin material). Setelah bantuan diberikan, persentase rumah tangga yang berada di kuadran I bertambah menjadi 87 rumah tangga, 51 rumah tangga di kuadran II (miskin material), 61 rumah tangga di kuadran III (miskin spiritual), sedangkan yang berada di kuadran IV menurun menjadi 37 rumah tangga. Secara umum, program PKH menunjukkan efektivitas moderat dalam menanggulangi kemiskinan multidimensi, meskipun belum optimal dalam mengangkat rumah tangga ke kondisi sejahtera sepenuhnya sehingga menunjukkan perlunya upaya lanjutan untuk memperluas dampak positif program ini.

Pembahasan

Hasil penelitian menemukan dari 236 KK penerima bantuan PKH di Kecamatan Kamang Magek, hanya 173 yang masuk kategori miskin (material atau absolut). Dengan demikian, akurasi penyaluran PKH adalah 73%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar penerima bantuan PKH tergolong miskin secara material, terdapat sejumlah keluarga yang justru berada dalam kategori sejahtera. Penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa masih terdapat kelemahan dalam akurasi penentuan sasaran penerima bantuan. Oleh karena itu, ke depan perlu dilakukan penajaman kriteria penerima manfaat dengan menambahkan indikator non-material seperti dimensi spiritual, partisipasi dalam kegiatan sosial-keagamaan, dan tingkat keberdayaan keluarga. Verifikasi data penerima harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan tokoh masyarakat, perangkat Nagari, dan pendamping PKH agar data yang dihasilkan lebih valid dan tepat sasaran.

Selanjutnya, agar program PKH tidak hanya menjadi solusi sementara atas kemiskinan material maka pendekatan spiritual harus diintegrasikan secara serius ke dalam desain program. Berdasarkan hasil analisis, meningkatnya jumlah keluarga dalam kuadran miskin total (kuadran III) mengindikasikan bahwa bantuan tunai saja belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan secara holistik. Oleh karena itu program pendampingan yang mencakup pembinaan rohani, penyuluhan moral, dan pelatihan keagamaan menjadi bagian penting yang harus dimasukkan dalam skema PKH. Pendamping PKH dapat bekerjasama dengan penyuluh Agama atau tokoh keagamaan setempat untuk mendampingi penerima bantuan dalam aspek spiritual dan akhlak.

Untuk meningkatkan efektivitas jangka panjang, evaluasi program juga harus dilakukan secara multidimensi. Pengukuran keberhasilan tidak cukup hanya dari sisi peningkatan pengeluaran rumah tangga tetapi juga harus mencakup perubahan perilaku, peningkatan kualitas hidup, serta komitmen keagamaan keluarga penerima. Dalam hal ini *CIBEST Model* bisa dijadikan alat evaluasi nasional yang mengukur kemiskinan berdasarkan dimensi material dan spiritual secara bersamaan. Laporan perubahan posisi kuadran sebelum dan sesudah bantuan dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas program dan menjadi dasar perbaikan kebijakan selanjutnya. Selain itu untuk menekan angka kemiskinan spiritual, penting bagi pemerintah agar mensinergikan PKH dengan program-program keagamaan lokal seperti majelis taklim dan kegiatan masjid lainnya. Dengan menjadikan kegiatan keagamaan sebagai bagian dari syarat atau indikator keberhasilan program, maka diharapkan tidak hanya aspek ekonomi penerima yang meningkat tetapi juga moralitas dan spiritualitas mereka. Kolaborasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Baznas, dan organisasi keagamaan perlu dibangun untuk memperkuat aspek ini.

Secara keseluruhan, pengembangan desain PKH ke depan harus mengarah pada pendekatan yang lebih komprehensif dan manusiawi dengan

menggabungkan intervensi ekonomi dan spiritual. Dengan strategi ini, diharapkan Program Keluarga Harapan tidak hanya menurunkan angka kemiskinan secara statistik tetapi juga membentuk keluarga yang berdaya secara spiritual, bermoral baik dan mampu bangkit dari ketergantungan bantuan dalam jangka panjang. Agar Program Keluarga Harapan (PKH) lebih efektif dalam penanggulangan kemiskinan perlu perluasan pendekatan dari materialistik ke spiritualistik dengan pemanfaatan *CIBEST Model* secara sistemik serta kolaborasi lintas sektoral antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kamang Magek telah mencapai tingkat akurasi yang cukup baik, meskipun masih terdapat sebagian penerima yang tidak tepat sasaran. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pendataan dan verifikasi agar bantuan benar-benar diterima oleh keluarga yang berhak. Selain itu hasil analisis juga menunjukkan bahwa PKH cukup efektif dalam menurunkan kemiskinan secara material tetapi belum sepenuhnya menjangkau dimensi spiritual keluarga penerima.

Untuk meningkatkan keberhasilan program ke depan, pendekatan yang lebih menyeluruh perlu diterapkan dengan menggabungkan dukungan ekonomi dan pembinaan keagamaan. Kolaborasi lintas sektor seperti pemerintah, tokoh Agama, dan lembaga sosial, sangat penting untuk memperkuat aspek moral dan spiritual dalam program. Dengan demikian, PKH tidak hanya membantu dari sisi finansial tetapi juga membentuk keluarga yang lebih mandiri dan berdaya secara menyeluruh.

Referensi

- Armida Salsiah Alisjahbana, E. M. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target, dan Strategi Implementasi*. Unpad Press.
- BAPPENAS. (2023). *Penduduk Berkualitas Menuju Indonesia Emas*. 1–74.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2015). Construction Of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 7(1), 87–104. <https://doi.org/10.15408/aiq.v7i1.1361>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Fuady, M., Fuady, M. R. F., & Aulia, F. (2022). Kemiskinan Multi Dimensi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Tataloka*, 24(4), 330–337. <https://doi.org/10.14710/tataloka.24.4.330-337>
- Garini, N. A., Ramadhan, S. H., Aliyyah, I. N., Ramadhan, S., Rafinda, I., & Sukmawati, E. (2023). Evaluasi Program Keluarga Harapan Dengan Logic Model Di Desa Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. *Responsive*,

- 6(1), 43. <https://doi.org/10.24198/responsive.v6i1.42757>
- Hasanah, R. (2016). *Pengembangan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Validasi Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Wonosari Menggunakan Metode AHP-Topsis*. Universitas Sebelas Maret.
- Husna, M., Puteri, H. E., & Winarno, W. (2019). Determinan Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Agam. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 3(2), 61. <https://doi.org/10.30983/es.v3i2.2556>
- Irvanasari, F., Pemerintahan, I., Jenderal, U., & Yani, A. (2018). Efektivitas Program Keluarga Harapan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung. *Jurnal Caraka Prabu*, 2(2), 175–189.
- Khaliq, A., & Uspri, B. (2017). Kemiskinan Multidimensi Dan Perlindungan Sosial. *Business Management Journal*, 13(2), 107–132. <https://doi.org/10.30813/bmj.v13i2.921>
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP YKPN.
- Nasution, C., Kgs. M. Sobri, Azhar, & Abdul Najib. (2023). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan. *Perspektif*, 12(4), 1374–1388. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i4.10076>
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83–104. <https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363>
- Rabbani, N., & Bundo, M. (2024). *Pendahuluan. 2022*(Bppd 2022).
- Shah, V., Hatamyar, J., Hidayat, T., & Kreif, N. (2025). Exploring the heterogeneous impacts of Indonesia's conditional cash transfer scheme (PKH) on maternal health care utilisation using instrumental causal forests. *ArXiv Preprint ArXiv:2501.12803*.
- Shirazi, N. S. (1994). *An Analysis Of Pakistan's Poverty Problem And Its Alleviations Through Infaq*. International Islamic University.
- Siagian, H. (2005). *Organisasi dan Motivasi*. Bumi Aksara.
- Suleman, S. A., & Resnawaty, R. (2017). Program Keluarga Harapan (Pkh): Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 88. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14213>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic Development. Thirteenth Edition. In *Pearson* (13th Ed., Issue 13th Edition). Pearson Education Limited. <https://www.mkm.ee/en/objectives-activities/economic-development>
- Viera Valencia, L. F., & Garcia Giraldo, D. (2019). Analisis Efektivitas Penyaluran Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 2).